



Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa

Gangga Izza Fahera¹, Made Dudy Satyawan²

^{1,2}Universitas Negeri Surabaya

¹gangga.18007@mhs.unesa.ac.id, ²madedudysatya@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 14 April 2022

Disetujui 15 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

Kata kunci:

Akuntabilitas; Kompetensi;
Partisipasi; Siskeudes; Dana
desa

Keywords :

Accountability;
Competence; Participation;
Siskeudes; Village fund

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menguji secara empiris mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian intern pemerintah desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang di dapatkan dari kuesioner yang telah disebar. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini dan didapatkan 102 responden yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan, kasi perencanaan dan kepala dusun di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil yaitu pengendalian intern pemerintah, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan pemanfaatan siskeudes tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

ABSTRACT

The research was conducted with the intention of empirically testing the influence of the competence of the village apparatus, the utilization of the village financial system, community participation, and the government's internal control system on the accountability of village fund management in Kepohbaru District, Bojonegoro Regency. This research uses quantitative methods. The data used is primary data obtained from questionnaires that have been distributed. The purposive sampling technique was used in this study and obtained 102 respondents consisting of village heads, village secretaries, heads of financial affairs, heads of general affairs, government kasi, people's welfare kasi, service kasi, planning kasi and hamlet heads in Kepohbaru District, Bojonegoro Regency. After testing, results were obtained, namely internal government control, the competence of village apparatus, and community participation had a significant effect on the accountability of village fund management, while the use of siskeudes did not affect the accountability of village fund management.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2014, Desa telah diberikan wewenang untuk mengelola dan mengatur desanya sendiri sehingga bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dalam mengatur desa secara mandiri, dapat dilakukan oleh pihak desa dengan cara menggunakan sumber daya yang terdapat pada daerahnya. Peraturan tersebut menjadikan pemerintah desa menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan semua hal-hal yang akan dilakukan di masa depan. Dalam melakukan pengelolaan dana desa, perangkat desa wajib melakukan pengelolaan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, pengelolaan juga dapat dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Penggunaan sumber pendapatan desa wajib dilaporkan pada laporan pertanggung jawaban secara rinci dan lengkap dengan menggunakan format APBDesa yang berlaku.

Dalam mengelola dana desa masih belum dapat dilakukan dengan sempurna karena masih ditemukan beberapa kelemahan di berbagai provinsi, salah satunya adalah Jawa Timur. Dalam provinsi Jawa Timur ditemukan adanya kelemahan mengenai pengelolaan dana desa, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan, kelemahan tersebut yaitu belum adanya ketertiban dalam menjalankan sistem komunikasi dan informasi pada pemerintahan desa, serta dalam hal menyampaikan laporan pertanggung jawaban masih terlambat dan pertanggungjawaban keuangan desa tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat (bpk.go.id). Hal ini diperlukan regulasi dalam mengelola dana desa dan program latihan bagi perangkat desa dari pemerintah pusat.

Pengontrolan yang lemah akan menyebabkan terjadinya manipulasi saat pengelolaan dana desa, seperti sebuah tindak kejahatan penggelapan dana yang dilakukan oleh kepala desa dan bawahannya.

Pada tahun 2019, pihak LSM Jaringan Paralegal Indonesia mengadakan evaluasi terkait penggelapan dana yang terjadi di desa dan hasilnya adalah kasus tersebut dapat terjadi karena adanya perangkat desa yang tidak mengerti tentang pengelolaan dana desa serta bagaimana menggunakan dana desa secara maksimum bukan karena tindak kejahatan kepala desa saja. Kasus korupsi atau penggelapan dana ini juga terjadi pada Kabupaten Bojonegoro yang pada tahun 2019 sebanyak dua kepala desa melakukan korupsi dengan tingkatan kerugian mencapai 1,1 miliar rupiah.

Selain dari LPI, evaluasi berdasarkan TSDD (Tinjauan singkat dana desa) pada tahun 2016-2020 juga mengungkapkan terjadinya masalah dalam pengelolaan dana desa. Hasil tersebut antara lain: dalam tiga tahun belakangan ditemukan adanya sisa dana desa di RKUN yang tidak disalurkan ke RKUD. Semua itu karena terdapat sejumlah ketidaksamaan data desa yang diajukan oleh Bupati setempat dengan yang dialokasikan oleh DJPK. Selain itu, terdapat desa yang tidak bisa menyalurkan dana desa dengan baik dan secara maksimal. Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa belum dilaksanakan dengan optimal dan akuntabel.

Dana desa yang diperoleh oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 yaitu sebanyak 363 juta rupiah. Dana tersebut diberikan pada 419 desa dari 28 kecamatan yang berada di Bojonegoro. Salah satu kecamatan yang mendapatkan alokasi dana desa tersebut adalah kecamatan kepothbaru. Kecamatan kepothbaru merupakan kecamatan yang mendapatkan dana desa lumayan besar dan terdiri dari desa maju dan mandiri. Dari penjelasan sebelumnya, dapat diketahui kalau akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terpengaruh oleh berbagai faktor. Dan beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain: Partisipasi masyarakat merupakan kegiatan pemerintah yang dimana masyarakat ikut terlibat dalam kegiatannya. Dalam mencegah terjadinya kecurangan diperlukan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya kegiatan. Penelitian ini didukung pula oleh penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan yaitu penelitian Mada dkk (2017), Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain partisipasi terdapat kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa adalah sebuah *skill* dari seseorang untuk atau karakteristik dasar manusia yang terdapat pada pribadi seseorang yang digunakan untuk menjalankan setiap pekerjaan (Hazrita et al, 2010). Dalam hal ini, kompetensi dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa. Dengan perangkat desa yang memiliki kompetensi memadai maka semakin berkurang juga kesalahan dalam mempertanggung jawabkan dana desa. Hal itu didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Malalag (2017). Penelitian tersebut menyatakan yang menjadi penyebab akuntabilitas masih belum baik adalah SDM yang masih belum memadai.

Setelah itu terdapat faktor pemanfaatan teknologi siskuedes. Sistem keuangan desa (Siskuedes) adalah sistem yang diberikan kepada pemerintah desa yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan pembuatan laporan keuangan sehingga laporan keuangan setiap kegiatan pemerintah desa dapat menjadi lebih akuntabel. Pemerintah desa harus mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi sistem keuangan desa ini untuk mempermudah pekerjaannya dan mempertanggung jawabkan dana desa. Hal ini didukung oleh penelitian Hendaris & Siras (2020), Azziz & Prastiti (2019) yang memperlihatkan kalau teknologi informasi siskuedes memiliki pengaruh pada pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.

Yang terakhir adalah sistem pengendalian internal desa. Sistem pengendalian intern pemerintah desa merupakan sebuah kegiatan dari proses menyempurnakan yang dilaksanakan teratur oleh pemimpin dan semua pegawai guna memberikan kepercayaan terhadap tujuan organisasi (PP No.6 Tahun 2008). Pengendalian dapat dicapai dengan baik jika pengendalian internal mampu diterapkan dengan baik pada pemerintah desa. Hal ini didukung oleh penelitian Ekasari dan Yudianto (2017), Martini dkk (2019) dan Mufti (2020) yang memperlihatkan kalau sistem pengendalian internal pemerintah desa dapat membuat akuntabilitas pengelolaan dana desa terpengaruh.

Dari uraian masalah di atas, dapat didapatkan rumusan masalah, yaitu: (1) Apakah terdapat pengaruh partisipasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? (2) Apakah terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? (3) Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa? (4) Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?.

Melihat pada rumusan masalah yang telah dibuat di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji serta melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari partisipasi masyarakat, kompetensi

aparatur desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi sistem keuangan desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kepohbaru.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang akan menghasilkan data yang dapat dihitung atau dijelaskan melalui angka (Sugiyono, 2015). Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro.

Jenis dan Sumber Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dapat memberikan hasil secara langsung pada penampung data (Sugiyono, 2019: 194). Sumber data bersumber dari responden melewati kuesioner yang sudah disebar oleh peneliti.

Populasi dan Sampel

Perangkat desa yang berada dalam daerah Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro akan dijadikan populasi dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah tujuan dan topik yang mempunyai ciri khas dan akan dipelajari oleh peneliti dan akhirnya akan memperoleh kesimpulan. Dari 25 desa di Kecamatan Kepohbaru, hanya dipilih 12 desa saja. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel: (a) Perangkat desa yang merupakan kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kasi pemerintah, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kasi perencanaan serta kasun. (b) Masa kerja minimal selama 1 tahun. (c) Pendidikan setidaknya minimal SMA/SMK sederajat.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependen (Y)

Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan dijadikan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Pengelolaan dana desa yang dapat dipertanggung jawabkan secara tepat dengan regulasi yang berlaku dapat disebut akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indikator yang dipergunakan pada variabel ini dapat dilihat melalui PMDN No.113 tahun 2014. Indikator tersebut, yaitu: (a) Merencanakan, (b) Melaksanakan, (c) Melaporkan, (d) dapat dipertanggungjawabkan, (e) Penatausahaan. Variabel Y akan diukur memakai skala likert lima point.

Variabel Independen (X)

Partisipasi Masyarakat (X1)

Sebuah bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk membuat pemerintahan menjadi lebih baik disebut dengan partisipasi masyarakat. Indikator dalam variabel ini dapat dilihat melalui Heller (1984) dan Sujarweni (2015) yaitu : (a) Memberikan solusi dan saran. (b) Menyusun kebutuhan anggaran. (c) Dilaksanakannya anggaran. X1 akan diukur menggunakan skala likert lima point.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa (X2)

Tata cara yang digunakan secara menyeluruh pada tindakan serta kegiatan yang memiliki hubungan satu sama lain harus sama dengan peraturan yang ada disebut sebagai sistem pengendalian internal pemerintah desa. Variabel ini bisa dilihat dari indikator yang terdapat dalam COSO, seperti : (a) pengendalian pemerintah, (b) risiko, (c) pengawasan, (d) komunikasi dan informasi, (e) aktivitas pengendalian. X2 akan diukur dengan memakai skala likert lima point.

Pemanfaatan Teknologi Sistem Keuangan Desa (X3)

Sistem keuangan desa (siskuedes) adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk memenuhi sebuah konsep akuntabilitas dalam mempertanggung jawabkan laporan keuangan. Variabel ini dapat dilihat melalui indikator dari Attatir (2017) dan Jurnal dan Supomo (2002), yaitu: (a) Pemanfaatan jaringan komputer dan (b) Pengungkapan. X3 ini akan diukur memakai skala likert lima point.

Kompetensi Aparatur Desa (X4)

Dalam menjalankan pekerjaannya, perangkat desa wajib memiliki sebuah kemampuan dan kompeten untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya. Variabel kompetensi aparatur desa ini dapat dilihat melalui indikator Mada *dkk* (2017) yaitu : (a) Pengetahuan, (b) Kemampuan, (c) *attitude*. X4 ini akan diukur memakai skala likert lima point.

Teknik Pengumpulan Data

Penyebaran kuesioner dipergunakan untuk memperoleh serta mengumpulkan data. Kuesioner akan disebar pada seluruh perangkat desa di Kecamatan Kepohbaru, di mana kuesioner tersebut memakai skala likert lima poin dengan ketentuan: (1) Sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) netral; (4) setuju; (5) sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Pengujian kualitas data dalam analisis data penelitian ini akan dilakukan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, dengan ketentuan akan dinyatakan valid apabila nilai *sig* lebih dari 0,05 dan akan dinyatakan reliabel jika nilai *cronbch alpha* > 0,07. Dan analisis selanjutnya akan dilakukan dengan melakukan uji linear berganda yaitu, uji R2, uji F dan Uji t dengan memakai tingkat *sig* 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini telah ditentukan sebanyak 12 kelurahan desa yang dijadikan sebagai sampel penelitian setelah melalui beberapa pertimbangan. Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebanyak 102 kuesioner dari 161 kuesioner yang telah diberikan pada desa-desa di kecamatan kepohbaru, rata-rata perangkat desa telah bekerja di pemerintah desa lebih dari 20 tahun masa jabatan, dan yang terakhir tingkat pendidikan responden rata-rata lulusan SMA sederajat.

Uji Kualitas Data

Dari pengujian validitas diketahui bahwa seluruh nilai *sig* pernyataan yang diajukan melebihi nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa pernyataan kuesioner tersebut valid dan layak dipergunakan. Untuk pengujian reliabilitas, 4 variabel dinyatakan reliabel karena nilai *cronbch alpha* melebihi 0,07.

Uji Normalitas Data

Data dapat dikatakan normal apabila nilai uji *kolmogorov sminov test* menunjukkan nilai yang melebihi nilai *sig*. 0,05. Pengujian ini memperoleh hasil sebanyak 0,200 sehingga data dapat dinyatakan normal dan asumsi klasik dapat diterima. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan hasil normalitas:

Tabel 1. Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	.28861502
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.032
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS

Uji Multikolonieritas

Data yang bermodel regresi akan dinyatakan baik apabila tidak terjadi adanya gejala multikolonieritas di mana hal ini dapat dilihat dari nilai VIF serta *tolerance*. Apabila nilai *tolerance* > 0,1 serta VIF < 10. Dapat dikatakan bahwa data di bawah ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas diperlihatkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil uji multikolonieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PM (X1)	0.947	1.056
SPIP (X2)	0.916	1.092
TIS (X3)	0.984	1.016
KAD (X4)	0.890	1.124

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS

Uji Heterokedastisitas

Untuk meregresikan nilai absolut residual pada variabel independen yang menghasilkan *probability value*, peneliti menggunakan uji *glejser*. Di bawah ini merupakan tabel yang diperoleh untuk melihat apakah terdapat gejala heterokedastisitas pada masing-masing variabel. Hasil yang didapatkan adalah semua variabel dinyatakan bebas dari gejala heterokedastisitas karena semua nilai melebihi nilai *sig.* 0,05. Di bawah ini merupakan rincian data yang diperoleh setelah dilakukan pengujian:

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	.437	.378			1.157	.250
PM (X1)	-.044	.043	-.104		-1.015	.313
SPIP (X2)	-.028	.051	-.056		-.539	.591
TIS (X3)	.053	.049	.109		1.083	.281
KAD X4	-.028	.041	-.071		-.671	.504

Sumber: Hasil Pengelolaan data SPSS

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian ini dilakukan guna melihat ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hasil analisisnya adalah seperti tabel 4, di bawah ini:

Tabel 4. Hasil uji regresi linear berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.,	Keterangan
		B	Std. Error	Beta			
Y	(Constant)	1.854	0.686		2.703	0.008	
	PM (X1)	0.187	0.079	0.203	2.375	0.020	Signifikan
	SPIP (X2)	0.302	0.093	0.283	3.252	0.002	Signifikan
	TIS (X3)	-0.135	0.090	-0.126	-1.505	0.136	Tidak Signifikan
	KAD (X4)	0.252	0.075	0.298	3.381	0.001	Signifikan

Alpha	5%		
R	: 0,573		
R Square	: 0,328		
<i>Adjusted</i> R Squared	: 0,301		
F Hitung	: 11.848	F Tabel	: 2.46
Sig. F	: 0.000	t Tabel	: 1. 9847

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Dari hasil uji pada tabel di atas, diperoleh persamaan penelitian yang disusun seperti di bawah:

$$Y = 0,203 X_1 + 0,283 X_2 - 0,126 X_3 + 0,298 X_4$$

Uji Ketepatan Model (Uji F)

Melihat pada tabel 4, diperoleh hasil bahwa nilai *sig* F= 0,000. Nilai tersebut lebih kecil daripada nilai *alpha* 0,05. Di sisi lain nilai F hitung= 11,848 sedangkan nilai F tabel= 2,46 atau 11,848 > 2,46 (F hitung lebih besar dari pada F tabel). Hal itu dapat diartikan bahwa uji F ini dapat dikatakan bahwa layak dipergunakan untuk menduga variabel bebas secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh pada variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini digunakan untuk melihat sejauh apa suatu model saat menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Dilihat dari tabel 4, menunjukkan hasil bawah nilai R bernilai sebesar 0,573 yang di mana ini memperlihatkan bahwa terjalin hubungan yang sedang antara keduanya. Sementara *adjusted* R Square bernilai sebesar 0,301 yang memiliki makna variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa diterangkan oleh variabel sebesar 30,1%. Sedangkan sisanya sebanyak 69,1% akan dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya.

Pembahasan

Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi berganda (tabel 4) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,375 dan t tabel sebesar 1,984. Sementara nilai *sig* sebesar 0,020, sedangkan nilai *alpha* yang dipakai adalah sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dan juga nilai *sig* lebih rendah dari pada nilai *alpha* yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengaruh partisipasi masyarakat sesuai dengan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Agrawal dan Ribbot (1999:477), di mana seluruh model akan bersifat berkesinambungan. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh pada akuntabilitas dikarenakan pemerintah akan lebih bertanggung jawab jika masyarakat ikut serta pada pengawasan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa tidak akan berani melakukan kecurangan jika masyarakat turut andil dan terlibat dalam pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas akan tercapai. Seperti yang dikemukakan oleh Grant dan Devas (2003:309), Akuntabilitas bisa dikokohkan melewati tingginya partisipasi masyarakat. Saat mempertanggung jawabkan pengelolaan dana desa harus dimulai pada tahap evaluasi hingga pelaporan (Ebrahim, 2003:818). Penelitian ini didukung oleh Zeyn (2011), Rahmanurrajjid (2008:6) yang mengemukakan dengan adanya partisipasi yang aktif akan menyebabkan akuntabilitas pemerintah desa menjadi lebih baik. Hasil penelitian sejalan oleh penelitian Mada *et al* (2017), Arifiyanto (2017), Aziz (2016), Gayatri dan Dewi (2019), dan Adnan dan Umaira (2019), di mana hasil tersebut mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi berganda (tabel 4) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,252 dan t tabel sebesar 1,984. Sementara nilai *sig* sebesar 0,002, sedangkan nilai *alpha* yang dipakai adalah sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

karena memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel serta hasil sig yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai $alpha$ yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan teori *steward ship*, dimana sistem pengendalian internal perlu ditumbuhkan dan dilestarikan pada pemerintah desa supaya pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Rasa keyakinan dapat diberikan oleh sistem pengendalian internal pada pemerintah desa saat menggunakan dana desa dan juga sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pelaporan laporan pertanggung jawaban dana desa. Hal ini disebabkan karena adanya lima unsur dalam *ship* yang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Asas-asas yang terdapat dalam pengendalian intern sudah dijalankan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif, memperoleh pelaporan pengelolaan keuangan secara baik serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil ini didukung oleh penelitian Martini (2019) yang memperlihatkan kalau sistem pengendalian dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa pada kecamatan sembawa. Selain itu juga, hasil ini didukung dengan penelitian Sugiyari dan Sugiyanto (2017), Swaitri dan Muhammad (2019), Triyono dkk (2019), dan Mufti (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Sistem Keuangan Desa (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi berganda (tabel 4) diperoleh nilai t hitung sebesar -1,505 dan t tabel sebesar 1,984. Sementara nilai sig 0,136, sedangkan nilai $alpha$ yang dipakai adalah sebesar 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan teknologi sistem keuangan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena nilai t hitung yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai t tabel sedangkan nilai sig yang lebih besar dari pada nilai $alpha$ yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa, meski pemanfaatan teknologi sistem keuangan desa dapat tumbuh dengan baik, maka akuntabilitasnya akan menurun. Penggunaan teknologi sistem keuangan desa secara maksimal belum mampu untuk bisa menggapai akuntabilitas yang baik. Dalam hal ini, walaupun sistem keuangan desa sudah baik, tetapi masih ada perangkat desa yang tidak sepenuhnya mengerti saat menjalankan aplikasi *siskeudes* sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam input data dan menyebabkan akuntabilitas tidak tergapai secara maksimal. Jika teknologi *siskeudes* terjadi pembaharuan yang bertahap akan membuat perangkat desa wajib memahami lebih dalam tentang bagaimana cara mengoperasikan teknologi tersebut dengan baik. Hal ini tidak selaras dengan teori *Stewardship*, di mana untuk mempermudah serta membantu pekerjaan perangkat desa dalam mengelola anggaran desa dibutuhkan sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa. Selain hal itu, seharusnya *siskeudes* mampu menjadikan akuntabilitas lebih baik sebab segala kegiatan yang dilaksanakan oleh desa akan direkam dalam sistem. Hasil ini didukung oleh penelitian Pahlawan et al (2020) dan Amalya, dkk (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tapi tidak dengan penelitian oleh Putra dkk (2016), Lusiono (2017), Kayigamba dan Murungi (2015) yang menyetujui jika pemanfaatan teknologi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X4) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Hasil analisis dengan menggunakan metode regresi berganda (tabel 4) diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 3,381 dan t tabel sebesar 1,984. Sementara nilai sig 0,001, sedangkan nilai $alpha$ yang telah ditentukan sebelumnya adalah sebesar 0,05. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena nilai t hitung yang lebih besar dari pada nilai t tabel dan nilai sig yang lebih rendah dari pada nilai $alpha$ yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan teori manajemen atau Teori *stewardh ship*, yang menyatakan bahwa untuk bisa mencapai kepentingan bersama, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa yang berperan sebagai pelayan dan masyarakat yang berperan sebagai pemilik dana yang pada dasarnya, sebagai manusia harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, jujur, memiliki kemampuan, mampu bertindak, berprinsip, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kompetensi ini sangat penting bagi perangkat desa untuk memilikinya. Apabila perangkat desa kompeten terhadap menjalankan tugasnya maka pertanggung jawaban pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Pada dasarnya, perangkat desa harus memiliki kemampuan dan tanggungjawab dalam setiap tindakan yang

dilakukannya. Hasil penelitian ini didukung oleh Subroto (2010) yang memperlihatkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang rendah dapat menjadi sebuah hambatan ketika mengelola penyaluran dana desa. Kompetensi manusia yang rendah, tidak adanya pengawasan serta evaluasi yang tidak baik akan menyebabkan perbedaan pengelolaan alokasi dana di tingkat desa. Hal ini akan mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak memperlihatkan pengelolaan yang bertanggungjawab. Selain itu, penelitian ini searah dengan penelitian Irma (2015), Fajri (2015), Makalalag (2017), Mada dkk (2017), dan Yuliana dan Setiana (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu variabel Partisipasi Masyarakat (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Desa (X2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X4). Dalam penelitian ini hanya ada satu variabel saja yang tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap variabel terikat yaitu variabel Pemanfaatan Teknologi Siskuedes (X3).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, T., & Akram, E. P. (2017). Determinants of Village Financial Management and Its Implication toward Accountability: Study on village governance in West Lombok Regency. *International Journal of Research in Advent Technology*, 5(12), 15-23.
- Aramide, S. F., & Bashir, M. M. (2015). The effectiveness of internal control system and financial accountability at local government level in Nigeria. *International Journal of Research in Business Management*, 3(8), 1-6.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Aswar, K. (2019). Affecting factors on accountability of village fund allocation management in Bogor District. *Information Management and Business Review*, 11(4 (I)), 43-49.
- Attatir, M. A. (2017). Analisis kemanfaatan perangkat lunak aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa (sebuah studi eksploratif berbasis aspiratif pada kantor pemerintahan desa di Kabupaten Kediri). <http://academia.edu>. Diakses pada tanggal, 20.
- Budiana, D. A., Said, D., & Sodik, N. (2019). the effect of village device competencies and internal control system on accountability of village management. *Scientific Research Journal*, 1(7), 10-20.
- Devi, S. (2020). *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO).
- Fitriyani, L. Y., Marita, M., Windyastuti, W., & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of village fund allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526-539.
- Hartikayanti, H. N., & Jayanti, D. (2022). Effect of internal and external factors on accountability of fund village governance. *Journal of Positive School Psychology*, 6(3), 7849-7856
- Hendaris, B., & Romli, R. (2021). Effect of village apparatus performance, internal control, information technology utilization on village fund accountability and implications on quality village financial report. *Dinasti International Journal of Management Science*, 2(4), 569-580.
- Ilhamsyah, A., & Zuhriyati, E. (2022). Analysis of the ability of the village government apparatus in managing village fund allocation (add) in Tugumulyo Village Lempuing Subdistrict Ogan Komerling Ilir Regency. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 398-403). Atlantis Press.
- Ivan, Y., & Ekasari, S. (2017). Pengaruh penerapan sistem pengendalian instansi pemerintah (spip) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Padjadjaran. Bandung*.

- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J. M. E., & Subowo, H. (2020). The effect of accountability and transparency of village fund management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45-64.
- Luthfiani, B. M., Asmony, T., & Herwanti, R. T. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Lombok Tengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1886-1899.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Kotamobagu Selatan kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill "*, 8(1).
- Rosa, C. P., & Morote, R. P. (2016). The audit report as an instrument for accountability in local governments: a proposal for Spanish municipalities. *International Review of Administrative Sciences*, 82(3), 536-558.
- Sari, N., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The effect of internal audit and internal control system on public accountability: The emperical study in Indonesia state universities. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(9), 157-66.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1523-1531.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105-112.